

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34  
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN  
BINA WIDYA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**DEBI JULHARIANDA  
11727100181**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Penataan Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru”**,  
yang ditulis oleh:

Nama : DEBI JULHARIANDA

NIM : 11727100181

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

**PERI PIRMANSYAH, SH., MH.**

NIK. 130217120

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **DEBI JULHARIANDA**  
 NIM : 11727100181  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 November 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Syafrinaldi, SH., MA.**

Penguji II  
**Peri Pirmansyah, S.H., M.H.**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkafli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEBI JULHARIANDA  
NIM : 11727100181  
Tempat/Tgl. Lahir : PINTU GORANG KARI / 12 Juli 1999  
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG DI KECAMATAN BINA MUDA KOTA PEKANBARU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya ,\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 OKTOBER 2021  
Yang membuat pernyataan



DEBI JULHARIANDA  
NIM : 11727100181

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Debi Julharianda (2021): Pengawasan Penataan Bangunan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan pengawasan penataan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Kecamatan Bina Widya dan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengingat pengawasan penataan bangunan belum terlaksana dengan baik dan masih harus dilakukan beberapa pengoptimalan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dan faktor penghambat pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, namun masih harus melakukan banyak perbaikan dan koreksi dibuktikan masih adanya bangunan yang melanggar konsep dan aturan tata ruang, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan tidak tertata dengan baik. Adapun Faktor Penghambat pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru yang cukup serius yaitu kurangnya anggota atau sumber daya, lemahnya koordinasi antar OPD dan bangunan tidak ditempati oleh pemilik.

**Kata kunci: Pengawasan, Penataan Bangunan**



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Erwin S.Pd, ibunda Harlina S.Pd, abang Dodi Nofri Harianto A.Md. Farm. dan kakak Dean Mareti Hariani A.Md. Farm. yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Erman M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Sahabatku Akmal Lahiya, Halim, Hardi Harfandi, Helmi Saputra, Hidayatul Ihsan, Iin Syaifulloh, Ikhbal M Maewa, Joy Putra, dan Riski Alfarizi yang selalu memberi dukungan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Penulis

**DEBI JULHARIANDA**  
**NIM. 11727100181**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PEDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	15
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	15
2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru .....	16
3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru .....	18
4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru .....	19
5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru .....	21
B. Gambaran Umum Kecamatan Bina Widya .....	23
1. Kondisi Geografis Kecamatan Bina Widya.....	23
2. Kondisi Demografis Kecamatan Bina Widya .....	23
3. Visi dan Misi Kecamatan Bina Widya .....	24
4. Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya.....	26
C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	27
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	27
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	29
3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan Ruang .....	41
<b>BAB III TINJAUAN TEORI</b>	
A. Teori Pengawasan.....	42
1. Pengertian Pengawasan .....	42
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan .....	42
3. Fungsi Pengawasan.....	45
4. Asas-Asas Pengawasan.....	47
5. Dasar Hukum Pengawasan .....	49
B. Teori Pemerintahan Daerah .....	51
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	51
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah .....	56
3. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.....	58
4. Fungsi Pemerintahan Daerah .....	61
C. Teori Tata Ruang .....	63
1. Pengertian Tata Ruang.....	63
2. Klasifikasi Tata Ruang .....	66
3. Asas-Asas Tata Ruang.....	67
4. Dasar Hukum Tata Ruang .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Penataan Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru .....	75
B. Faktor Penghambat Pengawasan Penataan Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	11
Tabel II.1	Luas Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan .....	18
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru .....	19
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin ....	24
Tabel IV.1	Tanggapan Masyarakat Mengenai Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan.....	81
Tabel IV.2	Tanggapan Masyarakat Mengenai Pengawasan Telah Dilakukan Oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru .....	81
Tabel IV.3	Tanggapan Masyarakat Mengenai Sudah Efektif Kinerja Yang Dilakukan Oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru .....	82
Tabel IV.4	Tanggapan Masyarakat Mengenai Penolakan Dari Masyarakat Terhadap Kebijakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru.....	82
Tabel IV.5	Tanggapan Masyarakat Mengenai Bangunan Milik Sendiri .	87



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya .....	26
Bagan II.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat-Surat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh pembangunan pemukiman yang sedang mengalami peningkatan di kota-kota besar. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat tempat pemukiman yang juga mengalami pertumbuhan. Tingginya angka kenaikan penduduk menyebabkan semakin tinggi pula angka permintaan lahan permukiman. Seiring pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan akan perumahan, penyedia sarana permukiman pun akan semakin tinggi baik melalui peningkatan ataupun pembangunan baru. Komposisi dan unsur yang membentuk permukiman beraneka ragam, serta kegiatan yang ditampung oleh tempat permukiman tersebut juga beraneka ragam.<sup>1</sup>

Aktivitas pembangunan memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan. Ini berarti berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktivitas pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak

<sup>1</sup> Lilik Anjar Setiawan, Winny Astuti, Erma Fitria Rini, "Tingkat Kualitas Permukiman", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Universitas Sebelas Maret 2017, Volume 12., No.1, h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.<sup>2</sup>

Pembangunan di wilayah perkotaan harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, yang dulu sering disebut dengan *master plan*, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir.<sup>3</sup>

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh daerah dan menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>4</sup>

Beberapa urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, dengan didasari oleh asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2016), h.20.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.21.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.101.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi terlaksananya penataan bangunan yang teratur dan sesuai dengan ketentuan legalitas, maka tugas tersebut dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang juga merupakan lembaga sebagai sarana tugas pembantuan yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah setempat, untuk melakukan penataan bangunan sebagaimana mestinya sehingga dapat terpantau dan terorganisir dengan baik di lingkungan kerjanya agar mampu menciptakan tujuan hukum melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional terutama dalam bidang penataan bangunan yang merupakan urusan penting yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk kota-kota besar Indonesia.<sup>6</sup>

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Walikota yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah di Kota memiliki salah satu tugas yaitu melakukan pembangunan daerah sesuai sumber daya yang dimiliki.<sup>7</sup> Maka oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan dalam hal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka terdapat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 dan telah diubah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Melalui peraturan kepala daerah tersebut disebutkan pada Pasal 31 ayat (1)

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 538.

<sup>7</sup> R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984), h.139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahwa Bidang Tata Ruang terdiri dari Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pemanfaatan Ruang, dan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Selanjutnya, pada pasal 34 Ayat (1) bahwa Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada ayat (2) huruf e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. Dari hal tersebut jelas bahwa mengenai penataan ruang khususnya bangunan menjadi salah satu tugas dan fungsi yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Kecamatan Bina Widya yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tampan terdiri dari lima kelurahan, yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya, dan Kelurahan Sungai Sibam, merupakan salah satu Kecamatan dengan banyaknya penataan bangunan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, di Kecamatan Bina Widya masih sangat mudah ditemui adanya bangunan yang berdiri tidak sesuai sebagaimana seharusnya dan disinyalir tidak memiliki izin mendirikan bangunan, data yang penulis dapatkan yaitu pada riset terdahulu terdapat 21 Ruko dan 8 rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan disepanjang jalan HR Soebrantas, yang didominasi oleh bangunan gedung lebih dari satu fungsi seperti bangunan rumah dengan toko (ruko) dan bangunan rumah dengan kantor (rukan) yang memiliki letak yang tidak beraturan sehingga terkesan tanpa adanya penertiban oleh pihak terkait.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zainur Abidin, SH., M.IP, "Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No.2, Februari 2017, h.80.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakta di lapangan berdasarkan pengamatan penulis, disepanjang Jalan Soebrantas dan Jalan Garuda Sakti banyak dijumpai bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung dan persyaratan teknis bangunan gedung. Terpantau bangunan ini beberapa diantaranya berdiri tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru, dimana bangunan yang terletak di jalan arteri maka Garis Sempadan Muka Bangunan (GSMB) minimal 20 meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan atau setengah dari lebar rencana Daerah Milik Jalan serta beberapa diantaranya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu banyak bangunan menutup drainase menggunakan beton dan tidak memberikan bak kontrol yang dapat menyebabkan tumpukan kotoran yang tidak bisa dilewati oleh air alhasil jika hujan datang genangan air akan meluap ke jalan yang menyebabkan banjir dan juga terdapat bangunan semi permanen yang digunakan untuk berusaha dimana dekatnya jarak dengan marka jalan yang tentunya mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya sehingga sering kali menyebabkan kemacetan kecil apabila ada pelanggan yang berbelanja di area tersebut. Ini seharusnya masuk dalam kategori evaluasi untuk segera dilakukan tindakan apabila tidak sesuai dengan tata letak bangunan yang seharusnya, hal ini jelas menjadi persoalan akibat tidak maksimalnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap penataan bangunan.

Dengan adanya regulasi dan permasalahan tersebutlah penulis bermaksud untuk meneliti tentang **“PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus pada Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?

2. Apa faktor penghambat pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.<sup>9</sup> Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.



mengenai pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan data serta informasi mengenai pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, artinya metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>10</sup> Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara

<sup>10</sup> Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.<sup>11</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>12</sup>
- b. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 30

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- c. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	NARASUMBER	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Masyarakat yang mendirikan bangunan	481 orang	25 orang	5,1%
Jumlah		483 orang	27 orang	

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021*

## 5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **7. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran lokasi penelitian, gambaran umum Kota Pekanbaru, gambaran umum Kecamatan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bina Widya Kota Pekanbaru, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori tentang Pemerintahan Daerah, Pengawasan, dan Tata Ruang.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian tentang pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dan faktor penghambat pengawasan penataan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

### **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, Berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.<sup>17</sup> Berdasarkan *Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 11 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang *controleur* yang berdomisili di Pekanbaru dan berstatus *Land schap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu Kota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan

<sup>17</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota> .Diakses pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru di kepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut *Gokung*. Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 NO 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut *Haminte* atau Kota Peraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UUD No. 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan UUD darurat No. 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi ibu Kota provinsi Kepulauan Riau).

## 2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut sekitar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 daerah Kota diperluas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\pm 62,96 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$  , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru  $632,26 \text{ Km}^2$ . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan. Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Adapun luas keseluruhan dari kota Kota Pekanbaru memiliki luas  $632,26 \text{ km}^2$ . Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Luas Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Tampan	59,81	9,465
2	Payung Sekaki	43,24	6,84%
3	Bukit Raya	22,05	3,49%
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70%
5	Tenayan Raya	171,27	27,09%
6	Limapuluh	4,04	0,64%
7	Sail	3,26	0,52%
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36%
9	Sukajadi	3,76	0,59%
10	Senapelan	6,65	1,05%
11	Rumbai	128,85	20,38%
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88%
<b>JUMLAH</b>		<b>632,26</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tenaya Raya yaitu 171,27 km atau 27,09%, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 2,26 km atau 0,36%.

### 3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan perekonomian. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 983.356 jiwa, yang terdiri dari 495.117 penduduk laki-laki dan 488.239 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**TABEL II.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase
1	Tampan	203.238	20,67%
2	Payung Sekaki	96.296	9,79%
3	Bukit Raya	93.478	9,51%
4	Marpoyan Damai	127.600	12,98%
5	Tenayan Raya	154.261	15,69%
6	Limapuluh	38.613	3,93%
7	Sail	20.384	2,07%
8	Pekanbaru Kota	22.604	2,30%
9	Sukajadi	42.852	4,36%
10	Senapelan	35.357	3,60%
11	Rumbai	78.185	7,95%
12	Rumbai Pesisir	70.488	7,17%
<b>JUMLAH</b>		<b>983.356</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas dilihat bahwa Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya dan Marpoyan damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak.<sup>18</sup>

#### 4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru bahkan mampu menyokong perekonomian Riau

<sup>18</sup><https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2021/02/26/9743fc346124ab08bd119d32/kota-pekanbaru-dalam-angka-2021.html> .Diakses pada 1 Juli 2021, Pukul 20:20 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 19,57% (tanpa migas), menempati urutan teratas. Dilihat dari sisi pembangunan manusia. Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 81,35 persen. Angka ini menempatkan Pekanbaru pada ranking teratas di Riau. Dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai IPM dengan kategori sangat tinggi. Perekonomian Pekanbaru mampu tumbuh positif, dengan besar 6,01% dan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini mampu menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup berarti, walau masih bertengger di kisaran angka 2%. Sampai dengan 2019 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 ribu orang atau 2,52%, di mana tahun sebelumnya pada 2018, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 31,62 ribu orang atau 2,85%.<sup>19</sup>

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sisi pengangguran pun turut mampu bergerak turun. Hingga Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pekanbaru tercatat 7,86%. Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran 2018 sebesar 8,42%.

Namun yang cukup mencengangkan, lebih dari separuh jumlah pengangguran ini justru didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta ditambah pula dari

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lulusan universitas. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja Pekanbaru didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sebesar 55,44%. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena pengangguran terdidik, yang dapat menjadi hambatan upaya Pekanbaru untuk bersaing di kancah global pembangunan.

Gambaran kemiskinan dan pengangguran merupakan sebagian kecil persoalan yang akan dihadapi, terkait kesehatan, pendidikan serta sarana dan infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian Pekanbaru tentunya terus dapat tumbuh dan melaju dengan pembangunan yang lebih baik ke depannya.

Kebijakan pemangku kepentingan tentunya sangat dinanti oleh masyarakat demi tercipta Pekanbaru yang semakin maju. Harapannya para pengambil keputusan dapat mengoptimisasikan sumber-sumber potensi unggulan yang telah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan potensi-potensi baru lainnya, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

## 5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru

Selang kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Ketiga sektor ini mampu berkontribusi sebesar 80,81%. Secara berturut adalah, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motor sebesar 31,41%; sektor konstruksi sebesar 30,16% serta sektor industri pengolahan sebesar 19,24%. Upaya untuk mengoptimalkan nilai tambah pada ketiga sektor unggulan, diharapkan mampu menopang laju perekonomian Pekanbaru ke depannya.

Peranan sektor perdagangan yang dominan mampu menunjang sektor terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang perlu ditonjolkan. Kota Pekanbaru yang kental dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana akomodasi yang memadai serta adanya objek-objek wisata baru yang mulai tumbuh, membuat Pekanbaru semakin dilirik sebagai kota tujuan wisata dan bisnis.

Dengan tumbuhnya sektor pariwisata tentunya tidak menutup kemungkinan akan bermunculan serta lahirnya aktivitas terbaru yang tidak kalah bagusnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Ide kreativitas mau tidak mau akan terasah untuk menghadirkan nuansa baru dalam perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha serta kewirausahaan dari para generasi muda, seperti semakin maraknya usaha-usaha kuliner baru seiring meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya sampai disitu, sisi seni dan artistik pun turut terpancing untuk tumbuh, ditandai dengan berjamurnya usaha jasa design, videografi serta fotografi. Hal ini menandakan perlunya integrasi serta sinergi dari berbagai lini lapisan perekonomian untuk dapat menciptakan Pekanbaru yang semakin kondusif dan sejahtera. Upaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimalisasi serta dukungan dan kerja sama yang erat antar sektor perekonomian diharapkan menjadi perwujudan visi Kota Pekanbaru, yakni *“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”*.<sup>20</sup>

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Bina Widya**

### **1. Kondisi Geografis Kecamatan Bina Widya**

Binawidya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kecamatan ini bernama Kecamatan Tampan. Namun sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan, Bina Widya menjadi Kecamatan baru. Kecamatan ini terdiri dari Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Binawidya, dan Kelurahan Sungai Sibam.<sup>21</sup>

Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan pada Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar;
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tuah Madani.

### **2. Kondisi Demografis Kecamatan Bina Widya**

Penduduk merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, penduduk

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Data Olahan Kecamatan Bina Widya, 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Bina Widya pada tahun 2020 tercatat 133.818 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki jiwa 68.464 dan perempuan 65.367 jiwa.

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin**

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Simpang Baru	18 573	17 488	36 061
2	Delima	16 244	15 985	32 229
3	Tobek Godang	18 067	17 222	35 289
4	Bina Widya	12 329	10 974	23 303
5	Sungai Sibam	3 251	3 685	6 936
<b>Jumlah</b>		<b>68 464</b>	<b>65 367</b>	<b>133 818</b>

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Bina Widya tahun 2020*

### 3. Visi Dan Misi Kecamatan Bina Widya

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Bina Widya harus dibawah dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, sekaligus produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Bina Widya dalam jangka panjang.

Jadi, menurut konsepsi diatas, serta visi Kota Pekanbaru yaitu :

***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.***

Untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Pekanbaru tersebut, maka Visi Kecamatan Bina Widya adalah sebagai berikut : ***“Professional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Se-Kota Pekanbaru”.***

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

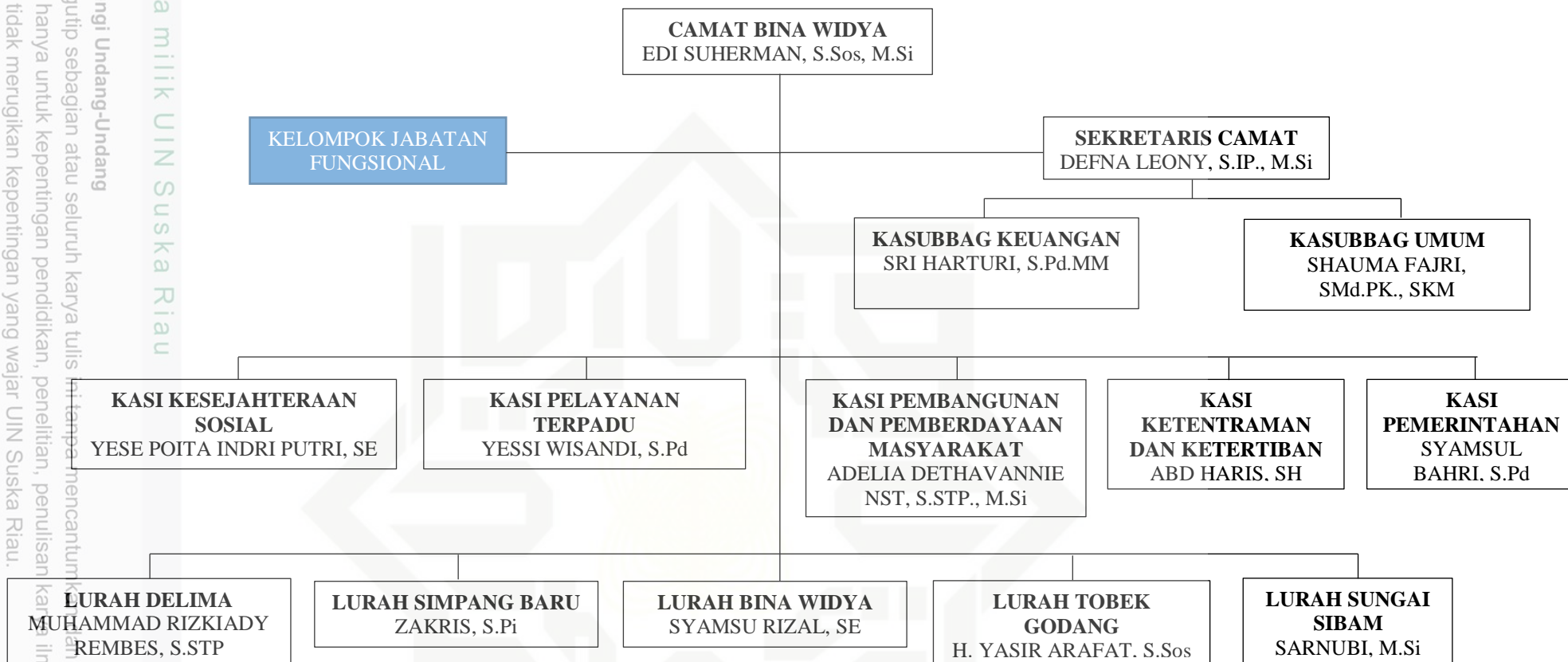
Setelah adanya visi (tujuan yang hendak dicapai) juga di perlukan adanya suatu misi (cara yang hendak di lakukan, untuk itu adapun misi Kecamatan Bina Widya adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkualitas, bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme.
- c. Melaksanakan koordinasi di setiap lini, terkait dengan penciptaan komunikasi yang efektif diantara aparatur kecamatan.
- d. Meningkatkan kerjasama, loyalitas, dan integritas didalam jiwa setiap aparatur kecamatan.



#### 4. Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya

**BAGAN 11.2**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya**



## C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dimulai pada saat Pekanbaru masih berstatus swatentra. Pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum yang dikepalai oleh Sucipto dari tahun 1963 sampai tahun 1967 yang berkantor di Jalan Senapelan atau tepatnya di Kantor Lurah Kampung Bandar, kemudian beliau diganti oleh Ahmad Fakieh, BA dari tahun 1967 sampai 1978 dimana Dinas Pekerjaan Umum pada saat itu sama-sama berada di kantor Walikota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bangunan Senapelan saat ini. Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat dan semakin banyak membutuhkan kegiatan pemerintahan maka sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru segera membangun Kantor Walikota, pada masa itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dijabat oleh Yazmi Yahya Bmue, dimulai tahun 1978 sampai tahun 1982.<sup>22</sup>

Pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan suatu konsep struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan memperkirakan kebutuhan terhadap fungsi serta perkembangan Kota Pekanbaru yang cukup pesat. Maka struktur organisasi Pekerjaan Umum tersebut diganti melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : Kpts.061/HOT.15/1962, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

<sup>22</sup> Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Tanggal 1 Mei 1982 dengan Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Cipta Karya
- c. Seksi Bina Marga
- d. Seksi Pengembangan Kota.

Pada saat itu terjadi serah terima jabatan antara Yasmi Yahya Bmue dengan Zubair Syaipuddin. Pada masa Zubair Syaipuddin, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan konsep struktur organisasi yang baru berpola maksimal. Namun setelah terlaksana misi tersebut beliau digantikan oleh Wasnuri Marza tepatnya pada tanggal 20 April 1993. Setelah Wasnuri Marza menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan dari kantor Walikota Pekanbaru ke Jalan Dagang No.78 Pekanbaru dan saat itu struktur organisasi berpola maksimal dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : KPTS.060/40/ORTAL/1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Pekanbaru tanggal 12 1993 dengan 1 sub dan 5 seksi.

Bapak Wasnuri Mirza selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru menjabat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi yang menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, beliau tidaklah bertahan lama karena kepindahan beliau ke BAPPEDA. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dikepalai oleh Bapak Ir. Firdaus CES sampai tahun 2007 dan selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kemudian digantikan oleh Bapak Ir. H. Idris Sani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sampai tahun 2009. Selanjutnya digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi sampai tahun 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak H. Zulkifli, H,ST. MP dan sekarang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak Indra Pomi Nasution ST. Msi.<sup>23</sup>

## **2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru**

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.<sup>24</sup>

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantuan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- 5) Penyelenggaraan urusan dan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- 2) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta untuk menyusun program.
- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- 6) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdapat sub bagian yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Program.

c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 3) Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- 4) Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- 6) Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber Daya Air.
- 7) Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 8) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sumber daya air terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan.
- 2) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 4) Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.
- 8) Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.
- 9) Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 10) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga.
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Bina Marga.
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan cipta karya. Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- 2) Perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan di Bidang Cipta Karya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- 7) Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan.
- 8) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang cipta karya memiliki 3 bagian yaitu :

- 1) Seksi Perencanaan Cipta Karya.
  - 2) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
  - 3) Seksi Penataan Bangunan.
- d. Bidang Jasa Konstruksi
- Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan jasa konstruksi. Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi.
  - 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota Pekanbaru.
  - 3) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
  - 4) Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
  - 5) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru.
  - 6) Penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin di Bidang Jasa Konstruksi.

- 7) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Jasa Konstruksi.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang jasa konstruksi terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
- 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
- 3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

e. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata ruang. Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan ruang.
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang.
- 3) Pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan penataan ruang.
- 4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penataan ruang.
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan penataan ruang.

- 7) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penataan ruang.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang tata ruang terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- 2) Seksi Pemanfaatan Ruang.
- 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan meliputi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem air limbah domestik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota.

- 3) Penyiapan bahan penyusunan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- 4) Penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan program ke{a Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi perumusan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 9) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi perumusan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 10) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan inventarisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

- 11) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 12) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 13) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

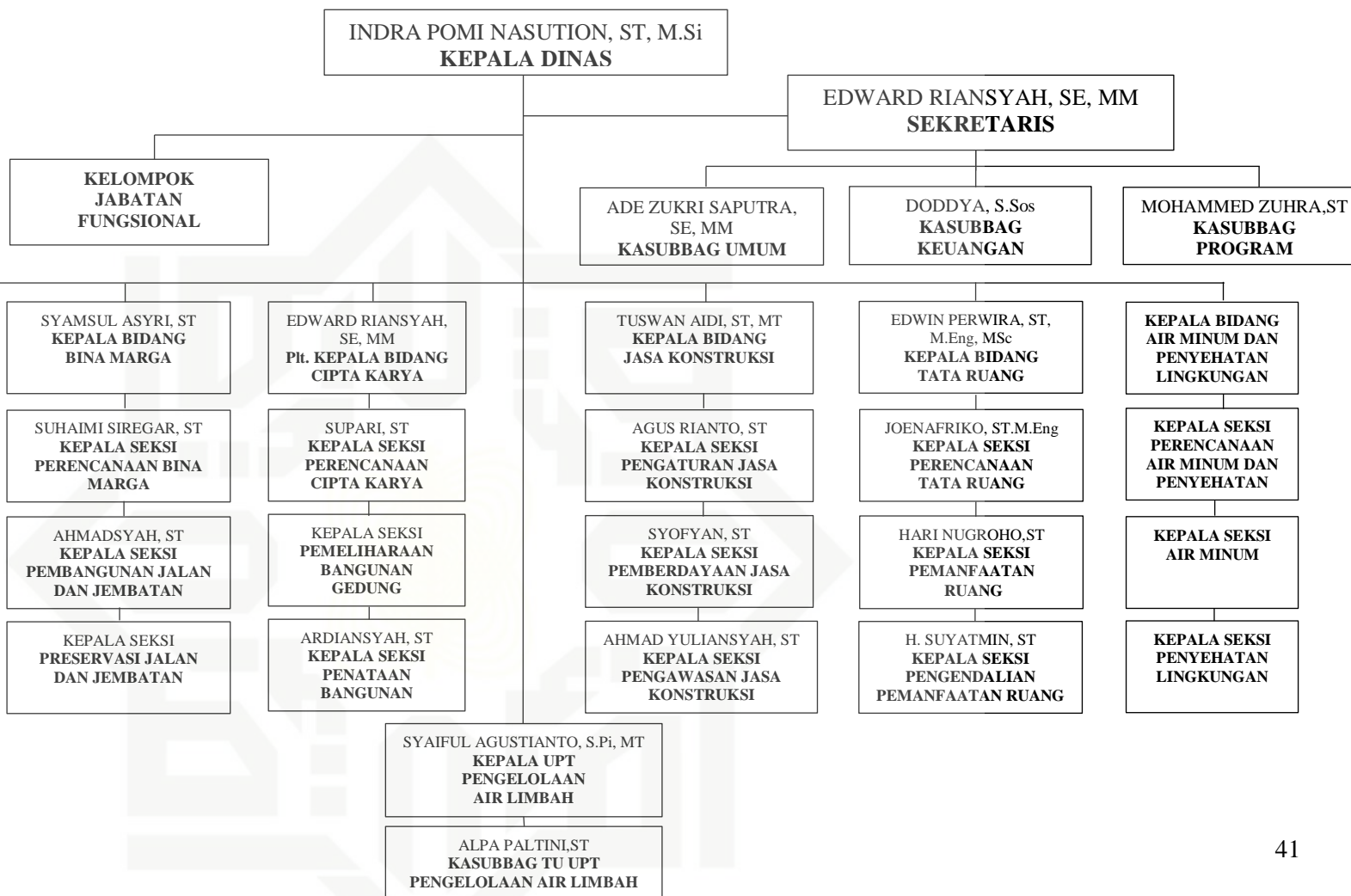
Bidang pertamanan memiliki 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- 2) Seksi Air Minum.
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.



### 3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

**BAGAN II.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Teori Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>25</sup>

##### 2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;

---

<sup>25</sup> Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Pengawasan ekstern (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.<sup>26</sup>

- b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan

---

<sup>26</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

#### c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

#### d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.<sup>27</sup>

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun

<sup>27</sup><https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada 2 Juli 2021, Pukul 14.47 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>28</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiha tahapan operasional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

<sup>28</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Asas-Asas Pengawasan

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*Principle of Direct Control*), artinya teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
- f. Asas refleksi rencana (*Principle of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle of Organization*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.

- h. Asas pengawasan individual (*Principle of Individual of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- i. Asas standar (*Principle of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle of Strategic Point Contol*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*Exception of Principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
- l. Asas pengawasan fleksibel (*Principle of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*Principle of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
- n. Asas tindakan (*Principle of Action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan-

penyimpangan rencana, organisasi, *staffing* dan *directing*.<sup>29</sup>

## 5. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut: “Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing”;
- c. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
  - 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;

<sup>29</sup><https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah/comment-page-1/>. Diakses pada 4 Juli 2021, pukul 20.16 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana dapat melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009), h.64.

## B. Teori Pemerintahan Daerah

### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.<sup>31</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>32</sup> Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>32</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.191.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 18, 18A, dan 18B yang berbunyi:

Pasal 18:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

<sup>33</sup> M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", Dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

**Pasal 18A:**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 18B:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Jadi ketika asas negara kesatuan ada yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>34</sup>

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Didalam pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Azlan Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan”, dalam *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, h.43.

<sup>35</sup> C.S.T Kansil dan Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Terdapat asas-asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:

### a. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>36</sup>

### b. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Desentralisasi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.<sup>37</sup> Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h.122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

#### c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>38</sup>

### 3. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan diri sebagai bangsa merdeka. Kemudian pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan susunan pemerintahan Indonesia.<sup>39</sup> Selanjutnya pengaturan pemerintahan daerah memulai sejarahnya.

Dimulai pada 23 November 1945 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Setidaknya ada tiga jenis daerah yang memiliki otonomi yaitu: Keresidenan, Kota otonom dan Kabupaten serta lain-lain daerah yang

<sup>38</sup> Widada, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, (Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas, 2018), h.10.

<sup>39</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap perlu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah Komite Nasional Daerah bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk pemerintahan sehari-hari dibentuk Badan Eksekutif dari dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pada 10 Juli 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hanya mengatur daerah otonom, tidak menyinggung daerah/wilayah administrasi.<sup>40</sup>

Sebagai pelaksanaan UUD Sementara 1950 maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. Undang-Undang ini hanya mengatur tentang pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan asas dekonsentrasi tidak diatur. Undang-Undang ini menganut sistem otonomi riil dan seluas-luasnya.

Sejalan dengan makin menguatnya partai politik kembali, maka tuntutan otonomi seluas-luasnya makin menguat kembali, sebagai tindak lanjut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini hanya mengatur asas desentralisasi. Kebijakan ini merupakan arus balik ke arah desentralisasi lagi. Tingkatan daerah terdiri atas tiga tingkat yaitu: Provinsi dan/atau

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I, Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II, dan Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.

Pada 1974 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini menganut tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Akan tetapi, dalam praktik asas dekonsentrasi lebih dominan karena control pusat sangat kuat melalui peran kepala daerah dan aparat-aparat pusat di daerah.<sup>41</sup>

Selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.

Lalu berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan Konstitusi Republik VI pasal 18, 18A, dan 18B. Dalam perjalanannya UU ini telah diubah sebanyak dua kali dengan Perppu Nomor 3 Tahun 2005 (ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005) dan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Pertama yakni dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian di Undangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015. Dan Perubahan Kedua yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 4. Fungsi Pemerintahan Daerah

Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk “normatif” yaitu berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi

---

<sup>42</sup> Genia Yahya, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Makasar: Andika Press, 2014) h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.<sup>43</sup> Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, "Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47.

## C. Teori Tata Ruang

### 1. Pengertian Tata Ruang

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.<sup>44</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali / sarana kontrol dan sebagai pengarah pembangunan. Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafat hakekatnya untuk mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (*ontologis*), adapun prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*epistemologis*), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (*aksiologis*) tapi masih belum terpenuhi. Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat

<sup>44</sup> D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 1997), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari garis laut terendah;

- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya;
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.<sup>45</sup>

Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang dihasilkan melalui proses perencanaan dengan pendekatan perencanaan sektoral dan perencanaan wilayah. Keseluruhan proses perencanaan tata ruang disertai dengan bagaimana seharusnya ruang dimanfaatkan disertai dengan pengendalian ruang disebut dengan penataan ruang.<sup>46</sup>

Tata Ruang mempunyai kaitan erat dengan penataan bangunan gedung, yang mana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam membangun bangunan gedung adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas da/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>47</sup>

Izin Mendirikan Bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.40.

<sup>47</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 22.

<sup>48</sup> Marihot P. Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan dan sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB.<sup>49</sup>

## 2. Klasifikasi Tata Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengertian kawasan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.<sup>50</sup> Dalam rangka akan dilaksanakannya suatu aktivitas pembangunan, harus memperhatikan fungsi utama dari suatu kawasan, yang terdiri atas :

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan (dalam Sektor Pelayanan Publik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 213.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya alam dan sumber daya buatan. Melihat fungsi utama dari kawasan lindung ini, dapat dikatakan bahwa kawasan lindung merupakan suatu wilayah yang tidak diperuntukan bagi dilaksanakannya aktivitas pembangunan;

- b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, kawasan budi daya merupakan suatu wilayah yang memang diperuntukan bagi aktivitas pembangunan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penataan ruang diseluruh wilayah Negara Indonesia, keberadaan fungsi kawasan tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam perencanaan tata ruang baik yang bersifat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha tertentu, yakni menempati wilayah sesuai dengan peruntukannya, disisi lain lokalisasi tersebut diharapkan dapat dengan mudah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian dampak dari kegiatan<sup>51</sup>.

### 3. Asas-Asas Tata Ruang

Penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Keterpaduan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud keterpaduan adalah bahwa penataan ruang

---

<sup>51</sup> Sandi Yudana, *Problematika Tata Ruang Bangunan*, (Jakarta: Sindomedia, 2016), h.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>52</sup>

Argumen mengenai pendekatan terpadu dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan.

b. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dalam mewujudkan asas yang tersebut diatas, pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam penyusunan indikator keserasian baik dari sisi pola ruang, tata kota dan denah bangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dijadikan acuan

<sup>52</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Makasar: Prenada Media, 2014), h.16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi daerah dalam mewujudkan tujuan tata ruang yang baik sesuai amanat UUD 1945 demi mencapai suatu keselarasan dan keseimbangan dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>53</sup>

#### c. Keberlanjutan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED (*world commission on environment and Development*) yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Maka ada empat prinsip dalam pembangunan itu sendiri meliputi:

- 1) Pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*)
- 2) Memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*)
- 3) Keadilan sosial (*social equality*)
- 4) Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*)

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keberdayaan dan Keberhasilgunaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Dari Penjelasan tersebut jelas bahwa tata ruang pada hakikatnya adalah sebagai sarana (instrumen yuridis) bagi pemanfaatan dan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan yang nyata, pemerataan pembangunan dan terwujudnya keterpaduan pembangunan wilayah.<sup>54</sup>

Pemerintah sebagai aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan perlu membuat rencana strategis tata ruang yang diaktualkan dalam rencana tata ruang wilayah jangka panjang, ketercapaian adalah hasil akhir dari sebuah proses, yaitu proses memperdayakan sumber daya alam yang ada di area tata ruang sehingga ruang dapat digunakan sebaik mungkin dalam koridor kemanfaatan, dan kemanfaatan inilah yang dijadikan ukuran apakah asas ini berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan tata ruang, dalam hal ini pemerintah bukan dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan, akan tetapi untuk melayani rakyat.

Merujuk pernyataan diatas, pemerintah sebagai pemangku pemegang andil utama dalam suatu kebijakan pengaturan suatu daerah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memiliki tolak ukur yang tepat dalam pengaturan atau pengelolaan suatu daerah. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara baik oleh pemangku kepentingan yang disebut masyarakat secara adil, tertib dan aman demi terwujud cita-cita negara. Hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi, dan suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dilakukan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu.<sup>55</sup>

e. Keterbukaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Keterbukaan idealnya adalah membuka dan menyiapkan wadah informasi bagi publik dan privat untuk mendapatkan semua informasi mengenai perencanaan pengelolaan tata ruang. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika pemerintah tidak membuka diri untuk hal ini seperti dewasanya. Disamping itu untuk memanifestasikan keterbukaan perlu dilibatkan masyarakat dalam menyusun rencana tata ruang sehingga apa yang di cita-citakan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan.

---

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h.156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kebersamaan

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Yang dimaksud dengan kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini akan terjadi dengan baik apabila semua pemangku kepentingan saling merasa membutuhkan, tanpa itu semua tidak mungkin kebersamaan akan tercipta. Tata ruang adalah hal yang tidak mudah jika direncanakan oleh satu pihak saja. Untuk itu perlu dilibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan segala aktifitas ketataruangan.

g. Perlindungan kepentingan umum

Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepentingan umum dapat kita contohkan dalam pro-kontra pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat yang tergabung dalam aktivis lingkungan selalu menentang keberadaan bangunan yang tidak tepat didirikan dalam tata ruang. Mengapa hal ini bisa terjadi keberadaan ruko dan bangunan tidak jauh lebih banyak manfaatnya dengan Ruang Terbuka Hijau yang akan digunakan dan dinikmati banyak orang.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 1997), h.34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Kepastian hukum dan keadilan

Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum

i. Akuntabilitas

Bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.<sup>57</sup>

**4. Dasar Hukum Tata Ruang**

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengaturan penataan ruang, adanya tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dijadikan sebagai dasar dalam penetapan suatu aturan hukum nasional dalam bidang penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, sebagai acuan penataan ruang nasional diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun kemudian diganti karena dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan

<sup>57</sup> Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang*, (Malang: UB Press, 2017), h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan penataan ruang yang ada di Indonesia. Selain itu adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam hal penataan ruang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu faktor dibuatnya peraturan penataan ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataagunaan Tanah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Penataan Bangunan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, namun masih harus melakukan banyak perbaikan dan koreksi dibuktikan masih adanya bangunan yang melanggar konsep dan aturan tata ruang, tidak memiliki Izin Mendirikan Banguna (IMB) dan tidak tertata dengan baik.
2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki faktor Penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya :
  - a. kurangnya anggota atau sumber daya,
  - b. lemahnya koordinasi antar OPD sehingga menyebabkan kinerja yang tidak maksimal,
  - c. banyaknya bangunan yang tidak ditempati oleh pemilik.



## B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih mengoptimalkan anggota yang ada untuk bahu-membahu menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar OPD terkait agar kemudian tidak terjadi *mised* komunikasi antar OPD terkait.
2. Bagi Masyarakat agar senantiasa mengikuti standar prosedur dalam mendirikan sebuah bangunan sesuai aturan, serta mampu bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk mengelola Kota Pekanbaru menjadi lebih maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019.
- Aditya Rizky, *Pemerintahan Indonesia dari Era Kolonial*, Bandung: Media Nusantara, 2016.
- Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan (dalam Sektor Pelayanan Publik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- D.A Tisnaadmidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.
- Genia Yahya, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia*, Makasar: Andika Press, 2014.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Samarinda: Fakultas Hukum, 2017.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuasa Cendekia, 2016.

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Marihot P. Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2012.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang*, Malang: UB Press, 2017.

R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984.

Sandi Yudana, *Problematika Tata Ruang Bangunan*, Jakarta: Sindomedia, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2010.

Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2017.

Widada, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas, 2018.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Makasar: Prenada Media, 2014.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, Jakarta: Grasindo, 2009.

## B. Jurnal

Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan", dalam *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, "Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012.

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010.

Lilik Anjar Setiawan, Winny Astuti, Erma Fitria Rini. "Tingkat Kualitas Permukiman." dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Universitas Sebelas Maret 2017. Volume 12. No.1.

M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", Dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018.

Zainur Abidin, SH., M.IP, "Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No.2, Februari 2017.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

**D. Website**

<https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2021/02/26/9743fc346124ab08bd119d32/kota-pekanbaru-dalam-angka-2021.html> .Diakses pada 1 Juli 2021, Pukul 20:20 WIB.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota> .Diakses pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsidanjenisjenispengawasan.html>, .Diakses pada 2 Juli2021, Pukul 14.47 WIB.

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep-nurul-hidayah/comment-page-1/> .Diakses pada 4 Juli 2021, Pukul 20.16 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **DEBI JULHARIANDA**  
 NIM : 11727100181  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 November 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Syafrinaldi, SH., MA.**

Penguji II  
**Peri Pirmansyah, S.H., M.H.**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalipus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3281/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 April 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

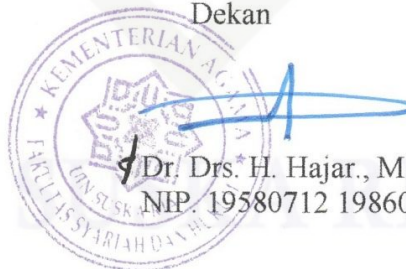
Nama : DEBI JULHARIANDA  
NIM : 11727100181  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penataan Bangunan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40696  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/3281/2021 Tanggal 5 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

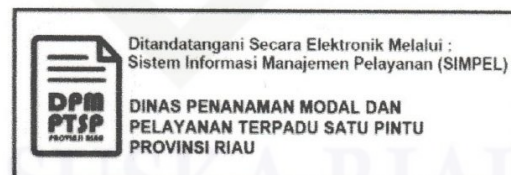
1. Nama : **DEBI JULHARIANDA**
2. NIM/KTP : **11727100181**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 24 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU  
 2. KECAMATAN BINA WIDYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1327/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/40696 tanggal 12 April 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**DEBI JULHARIANDA**

11727100181

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

DUSUN MANGGIS DESA PINTU GOBANG KEL. KUANTAN TENGAH-KUANTAN SINGINGI

**PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 24 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU**

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

2. KANTOR KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 April 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

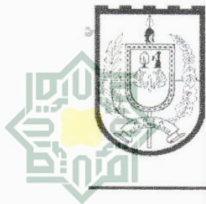
Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Pekantoran Tenayan Raya Gedung B. 9 Lt. 4-5  
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau  
**PEKANBARU - (28284)**

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Nomor : 543 /DPU-PR/SEKRE/VI/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Telah Melaksanakan Izin Riset

Kepada Yth;  
Sdr. Dekan Fakultas Syariah  
Dan Hukum  
UIN Suska Riau

Di -  
Pekanbaru

Sehubungan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN – RISET/ 40502, Tanggal 06 April 2021, Perihal Rekomendasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : DEBI JULHARIANDA  
NIM : 11727100181  
JURUSAN : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset dengan Judul ("PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 24 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU.").

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

An.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU  
Sekretaris



EDWARD RIANSYAH, SE, MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19850223 200902 1 002

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang  
1. Dilarang memperjualbelikan, sebagian atau seluruh karya ilmiah tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317 Pekanbaru

## SURAT KETERANGAN Nomor : 400/KB-Kessos/ 163/2021

Yang Bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : YESE POITA INDRI PUTRI, SE  
b. Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. NIM : 11727100181  
b. Nama : DEBI JULHARIANDA  
c. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
d. Jurusan : Ilmu Hukum  
e. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penataan Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.  
Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset/ Pra Riset dan Penelitian pada Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

a.n. Camat Binawidya  
Kasi Kessos



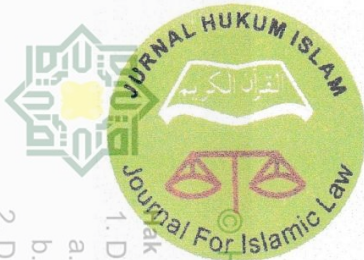
YESE POITA INDRI PUTRI, SE  
NIP. 19800908 200501 2 009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
c. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : DEBI JULHARIANDA  
**NIM** : 11727100181  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU

**Pembimbing: Peri Pirmansyah, S.H., M.H.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 November 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**DEBI JULHARIANDA**, lahir di Pintu Gobang Kari pada tanggal 12 Juli 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Erwin dan Ibunda Harlina. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 013 Pintu Gobang Kari, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Teluk Kuantan, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa Pulau Baru Kopah, Kecamatan Kuantan Tenah, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 04 November 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU”**.